

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Visi yang akan diwujudkan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”

Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Kepegawaian Daerah mendukung Misi ke-6 yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas“

Misi meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas mengandung arti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- a. Tujuan
Meningkatnya profesionalitas ASN
- b. Indikator Tujuan
Indeks Profesionalisme ASN
- c. Sasaran
Menguatnya Sistem Merit Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka posisi BKD Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

NO	TUJUAN BKD PROV. SUMSEL	SASARAN BKD PROV. SUMSEL	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Meningkatnya Profesionalisme ASN Pemprov Sumsel	Nilai IP ASN	81
			Nilai NSPK	90
		Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80%
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12%
		Meningkatnya Kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	90%

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1.1 TUJUAN

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional

3.1.2 SASARAN

1. Meningkatkan profesionalisme ASN Pemprov Sumsel
2. Meningkatkan Tata Kelola ASN
3. Meningkatkan Kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel

INDIKATOR SASARAN

Indikator Sasaran merupakan alat ukur secara kuantitatif atau dapat juga kualitatif yang dikuantitatifkan yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, pening dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode
		[2023]	[2024]	[2025]	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Sistem Merit	281	325	-	-
	Nilai IP ASN	-	76	81	81
	Nilai NSPK	65,47	71	90	90
2	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	100%	80%	80%
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	100%
	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,46%	9%	12%	12%
	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	87%	88%	90%	90%

3.1. Program dan Kegiatan

3.2.1 Program

Upaya pencapaian sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dijabarkan dalam 2 Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Kepegawaian

3.2.2 Kegiatan

Pada Tahun 2025 terdapat 2 (dua) Program, 11 kegiatan serta 35 sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

30	Pengelolaan Promosi ASN
J	Pengembangan Kompetensi ASN
31	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
32	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
K	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
33	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
34	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
35	Pembinaan Disiplin ASN

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - b. Pencapaian Renstra SKPD;
 - c. Pelaksanaan Tupoksi SKPD
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Jumlah program sebanyak 2 (dua) program dan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus di Palembang.
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif bersumber dari APBD Provinsi Sumatera selatan sebesar Rp. 24.456.517.831,00.

11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
13	Fasilitas Kunjungan Tamu
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17	Pengadaan Mebel
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
H	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
26	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
27	Fasilitas Lembaga Profesi ASN
28	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
I	Mutasi dan Promosi ASN
29	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN